

CERAI GUGAT KARENA SUAMI TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN
(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 5/Pdt.G/2020/PASj)

Oleh :
RIZKA INDRIYANI
E1A016245

ABSTRAK

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kenyataannya tujuan perkawinan sulit untuk diwujudkan dalam perkawinan, sehingga dalam perkawinan sering terjadi perceraian yang berakibat putusya hubungan antara suami dan isteri. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat asas perkawinan yang salah satunya adalah asas mempersukar terjadinya perceraian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat dalam Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 5/Pdt.G/2020/PASj, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian prespektif analisis, teknik pengumpulan data studi keperpustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sinjai berwenang mengadli Perkara Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PASj sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pertimbangan Hukumnya berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dapat dilengkapi dengan Pasal 39 ayat (2) huruf (e) penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Serta menambahkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata kunci : *Perkawinan, Cerai Gugat*

DISCUSSION FOR THE HUSBAND DOES NOT MEET OBLIGATIONS
(Juridical Review of the Sinjai Religious Court Decision Number 5 / Pdt.G /
2020 / PASj)

By:
RIZKA INDRIYANI
EIA016245

ABSTRACT

In Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is stated that marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Almighty God. In fact, the goal of marriage is difficult to achieve in marriage, so that in marriage, divorce often occurs which results in breaking up of the relationship between husband and wife. In the general explanation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, there is a principle of marriage, one of which is the principle of making divorce difficult.

The formulation of the problem in this research is how the judges' legal considerations in granting a sue divorce case in the Sinjai Religious Court Judgment Review Number 5 / Pdt.G / 2020 / PASj, the method used in this research is normative juridical, analysis perspective research specifications, collection techniques library study data with an inventory, the data collected is then presented in the form of narrative text and qualitative normative analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the Sinjai Religious Court has the authority to try Decision Case Number 5 / Pdt.G / 2020 / PASj in accordance with Article 49 paragraph (1) of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 About the Events of Religion. Legal considerations are based on Article 39 paragraph (2) Elucidation of Law Number 1 Year 1974 jo Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 Year 1975 in conjunction with Article 116 letter (e) Compilation of Islamic Law. According to researchers, the Legal Considerations of the Panel of Judges in deciding cases for divorce can complement Article 19 letter (e) of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (e) Compilation of Islamic Law. As well as adding Article 33 and Article 34 of Law Number 1 Year 1974.

Keywords: *Marriage, Divorce*